# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1958 TENTANG

# PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 21) TENTANG PEMBENTUKAN BADAN URUSAN DAGANG

## Presiden Republik Indonesia,

# Menimbang:

Bahwa berhubung dengan adanya kekeliruan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 21) tentang pembentukan Badan Urusan Dagang dan dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah tersebut ditunjuk suatu peraturan Penguasa Militer, yang karena berdasarkan peraturan S.O.B. menurut pasal 60 dari Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957, tidak lagi akan berlaku nanti pada tanggal 17 April 1958, dianggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas;

# Mengingat:

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 (LN. 1958 No. 21 ) tentang pembentukan Badan Urusan Dagang;

# Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1958;

## **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.11 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 21) TENTANG PEMBENTUKAN BADAN URUSAN DAGANG

sebagai berikut:

#### Pasal I.

Bagian kalimat terakhir dalam diktum Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958, sesudah kata-kata "Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang", yang berbunyi :

" yang telah dikuasai oleh Pemerintah" dihapuskan.

#### Pasal II.

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 dijadikan pasal I dan

dirubah, sehingga berbunyi:

"Semua perusahaan perdagangan milik warga-negara Belanda, baik yang untuk seluruhnya maupun sebagian bermodal Belanda, dan melakukan usaha perdagangan diwilayah Republik Indonesia, termasuk cabang-cabang usahanya dan walaupun mempunyai cabang usaha dilapangan lain, dikuasai dan diurus oleh Pemerintah.

#### Pasal III.

Pasal I dari Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 dijadikan pasal 2 dengan dirubah bunyinya sebagai berikut:

"Untuk melakukan tugas tersebut pada pasal I dibentuk Badan Urusan Dagang dengan singkat B.U.D. yang bertempat kedudukan di Jakarta".

#### Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 4 Maret 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 22 Mei 1958. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

(SOENARJO)

Diundangkan pada tanggal 31 Mei 1958. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGKOM)

# LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 55